

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA  
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)  
PD. BPR BANK DAERAH PATI  
TAHUN 2018**

**PENDAHULUAN**

PD. BPR Bank Daerah Pati menyadari bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam memelihara kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan terhadap PD BPR Bank Daerah Pati. Hal ini dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan.

Melalui penerapan prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) diharapkan PD BPR Bank Daerah Pati dapat mempertahankan kelangsungan usahanya yang sehat dan kompetitif. Dengan berlandaskan pada pandangan tersebut di atas, PD BPR Bank Daerah Pati berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Secara umum, pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar organ/unit kerja di PD. BPR Bank Daerah Pati telah mencerminkan adanya penerapan prinsip check and balance serta sistem pengendalian internal yang baik. Struktur Tata Kelola PD. BPR Bank Daerah Pati terdiri dari :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;
2. Dewan Pengawas ;
3. Direksi ;

Struktur tata kelola perusahaan tersebut di atas telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas, tanggung jawab, serta fungsinya masing – masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE / TATA KELOLA BPR**

**❖ FAKTOR – FAKTOR PENILAIAN PELAKSANAAN GCG YAITU :**

- I. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- II. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas dan Direksi
- III. Fungsi Audit Intern PD. BPR Bank Daerah Pati
- IV. Fungsi Audit Ekstern
- V. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern
- VI. Pengawasan Aktif Dewan Pengawas dan Direksi
- VII. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

- VIII. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko
- IX. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar
- X. Rencana Strategis Bank
- XI. Rencana Jangka Menengah dan Pendek (*Business Plan*)
- XII. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan.
- XIII. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Pengawas dan Direksi dengan Anggota Dewan Pengawas Lainnya, Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.
- XIV. Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*) dan Upaya Penyelesaian oleh Bank
- XV. Permasalahan Hukum
- XVI. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
- XVII. Pemberian Dana untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik
- XVIII. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Pengawas

Dengan penjelasan - penjelasannya sebagai berikut :

#### I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur GCG di PD. BPR Bank Daerah Pati dan RUPS merupakan wadah pemegang saham untuk menggunakan hak dan wewenangnya. RUPS juga memegang wewenang yang tidak didelegasikan kepada Dewan Pengawas atau Direksi sesuai batasan yang diatur dalam anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama tahun 2018, telah diselenggarakan 3 kali RUPS yang terdiri dari :

1. RUPS Laporan Tahunan Tahun 2017
2. RUPS Penambahan Modal disetor.
3. RUPS Rencana Bisnis tahun 2019.

#### II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

##### a. DEWAN PENGAWAS

Dewan Pengawas adalah organ Perseroan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai Anggaran Dasar serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perusahaan dan menerapkan Good Corporate Governance (GCG). Dewan Pengawas bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif kolegial dibantu oleh Pejabat Eksekutif SKAI dan Pejabat Eksekutif Manajemen Resiko.

Pedoman dan tata tertib Dewan Pengawas PD. BPR Bank Daerah Pati merupakan pedoman kerja Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan secara efisien, efektif, transparan, kompeten, independen dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mencapai visi dan misi Bank.

Susunan Dewan Pengawas PD. BPR Bank Daerah Pati sampai 31 Desember 2018, terdiri dari :

Ketua Dewan Pengawas : Suharto S.E.  
Anggota Dewan Pengawas : Bambang Rijanto, B.Sc.

Jumlah anggota Dewan Pengawas tersebut di atas tidak melebihi jumlah anggota Direksi PD. BPR Bank Daerah Pati. Seluruh anggota Dewan Pengawas telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan serta seluruhnya berdomisili di Kabupaten Pati Jawa Tengah Indonesia. Dewan Pengawas mengadakan rapat minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Masing - masing anggota Dewan Pengawas memiliki kompetensi tinggi dan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Pengawas.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

#### **Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas**

Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati sebagai pemilik untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada Direksi, terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam mengelola Bank. Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas adalah untuk memastikan kelangsungan usaha Bank dan memastikan bahwa Direksi menjalankan tugas dengan itikad baik untuk kepentingan Bank, serta pemangku kepentingan lainnya (*stakeholders*). Dalam pelaksanaannya, tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas antara lain meliputi :

1. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan stratejik.
2. Memastikan dilaksanakannya ketentuan - ketentuan Anggaran Dasar Bank dan memastikan terselenggaranya GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada setiap tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi Satuan Kerja Audit Internal, audit eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Memberitahukan kepada Otoritas Perbankan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan keuangan, termasuk juga kondisi lainnya atau perkiraan kondisi yang mungkin dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

## **Rekomendasi Dewan Pengawas**

Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Pengawas secara aktif berinteraksi dengan Direksi maupun para Pejabat Eksekutif antara lain melalui penyelenggaraan rapat secara berkala dan turut memberikan rekomendasi dan/atau nasehat kepada Direksi guna memastikan bahwa pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada seluruh tingkatan organisasi telah berjalan sesuai yang diharapkan.

## **Agenda Rapat Dewan Pengawas Tahun 2018 :**

### **➤ Triwulan Pertama tanggal 11 April 2018**

1. Membahas tentang evaluasi perkembangan Triwulan I
2. Realisasi asset bank s/d Maret 2018 mencapai 103% atau naik 3% dari rencana asset s/d Maret 2018 yaitu sebesar Rp. 291.284.192.036,-
3. Perkembangan pencapaian asset seperti itu dari sisi aktiva lebih dipengaruhi oleh :
  - Penempatan dana pada bank lain mencapai 112 % melampaui sebesar Rp. 3.761.381.202,- dari rencana s/d Maret 2018
  - Aset tetap dan inventaris s/d Maret 2018 mencapai 156% yaitu sebesar Rp. 4.078.909.242,- dari rencana. Pelampauan yang cukup besar dikarenakan adanya pengadaan aktiva tetap berupa pembelian tanah dan gedung baru. Pengadaan tanah dan bangunan tersebut telah melalui mekanisme dan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - Perkembangan aktiva produktif kredit sebesar Rp. 251.711.255.791,- hanya tercapai sebesar 99% masih kurang 1% dari rencana kredit s/d Maret 2018, sehingga perkembangan kredit belum memberikan pengaruh yang signifikan bagi perkembangan asset.
4. Perkembangan pencapaian asset di sisi pasiva dipengaruhi oleh :
  - Realisasi dana dari masyarakat (tabungan dan deposito) saldo s/d Maret 2018 mencapai 102% yaitu sebesar Rp. 3.446.788.471,- melampaui rencana s/d Maret 2018.
  - Realisasi penyertaan modal daerah sebesar Rp. 3.000.000.000,- yang sementara masih tercantum dalam pos dana modal.
  - Ekuitas bank s/d Maret 2018 mencapai 106% melampaui 6% atau sebesar Rp. 2.363.583.792,- dari rencana.
5. Perkembangan kredit dilihat dari out standing kredit  
Per sector ekonomi produktif
  - Sektor pertanian (musiman) : Rp. 17.204.457.031,-
  - Sektor perdagangan : Rp. 41.400.907.688,-
  - Sektor jasa : Rp. 13.752.437.267,-
  - Kredit Konsumtif : Rp. 179.353.453.806,-

Proporsi kredit tersebut s/d Maret 2018 lebih rendah dari posisi tahun 2017.

- Kredit sesuai kolektibilitas
  - Lancar realisasi s/d Maret 2018 sebesar Rp. 243.114.134.154,- tercapai 99% masih kurang 1% dari rencana s/d Maret 2018
  - Non Lancar yang terdiri dari kurang lancar, diragukan dan macet realisasi s/d Maret 2018 sebesar Rp. 8.597.121.637,- mencapai 102% atau 2% diatas rencana Maret 2018 sebesar Rp. 204.2196.637,-

6. NPL ( Non Perform Loan) kredit

Apabila dilihat dari kredit yang non lancar melampaui 2% diatas rencana sementara out standing kredit justru tercapai kurang -1% terhadap rencana maka rasio NPL mencapai 3,42% berada diatas rencana target NPL Maret 2018 yang ditetapkan sebesar 3,29%

7. Pendapatan

Realisasi pendapatan sebesar Rp. 954.215.555,- tercapai 92% dari rencana s/d Maret 2018. Hal tersebut dipengaruhi oleh :

- Realisasi pendapatan bunga kredit s/d Maret 2018 sebesar Rp. 533.088.953,- baru tercapai 95% disebabkan realisasi kredit masih dibawah target rencana.
- Realisasi pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain masih mencapai 77% dari rencana s/d Maret 2018
- Realisasi pendapatan non operasional berupa ganti rugi asuransi hasilnya nihil.

8. Biaya

- Realisasi total biaya Rp. 1.001.407.554,- tercapai 89% masih dibawah rencana s/d Maret 2018. Hal ini disebabkan karena sebagian besar sub - sub biaya operasional seperti beban bunga kontraktual, biaya pemasaran, biaya tenaga kerja, beban sewa, beban pemeliharaan dan perbaikan, beban barang dan jasa dan beban lainnya bisa ditekan dan terealisasi dibawah rencana s/d bulan Maret 2018.
- Disisi lain masih ada sub biaya operasional yang realisasinya telah melampaui rencana yang ditetapkan antara lain :
  - Beban bunga tabungan naik sebesar 105% dari rencana dikarenakan dana tabungan telah melampaui rencana
  - Beban bunga deposito naik sebesar 104% dari rencana dikarenakan telah melampaui rencana.
  - Biaya LPS terealisasi 107% dari rencana dikarenakan realisasi dana masyarakat semakin besar dan telah melampaui rencana target.

- Beban PPAP kredit mencapai 130% dari rencana beban PPAP dikarenakan perkembangan kredit macet yang besarnya sudah melampaui target
  - Bantuan pajak pasal 21 telah mencapai 115% dari rencana
  - Tunjangan Operasional Kantor Kas telah mencapai 1.437% dari rencana yang ditetapkan
  - Beban sewa jaringan LDP telah mencapai 451% dari rencana yang ditetapkan
  - Beban amortisasi aset tidak berwujud telah mencapai 104% dari rencana yang ditetapkan
9. Sampai dengan Maret 2018 realisasi pendapatan mencapai 92% atau masih 8% dibawah rencana sedangkan pada total biaya realisasi tercapai 89% (mampu menekan 11% dibawah) dari rencana sehingga dengan pencapaian pendapatan dan biaya seperti tersebut bank mampu menghasilkan perolehan laba sebelum pajak sebesar Rp. 2.534.375.176,- atau mencapai 145% melampaui dari target sebesar Rp. 784.679.746,- sekitar 45% dari target laba s/d Triwulan I tahun 2018.
10. Kesimpulan
- Realisasi dana masyarakat menunjukkan pencapaian dan progress peningkatan yang semakin besar. Hal ini menjadi potensi dalam mendukung pendanaan kredit karena dengan semakin besarnya penghimpunan dana masyarakat maka bank secara bertahap perlu mengurangi pendanaan yang berasal dari pinjaman pihak ketiga guna mencapai struktur pendanaan yang lebih efisien.
  - Perkembangan penyaluran kredit di sector ekonomi produktif s/d Triwulan I tahun 2018 masih belum menunjukkan kenaikan yang signifikan karena terlihat prosentasenya masih menurun dibanding dengan posisi tahun 2017.
  - Perkembangan kredit non lancar terutama kolektibilitas macet realisasinya masih menunjukkan pelampauan target rencana sehingga mendorong kenaikan kredit NPL.
  - Operasional bank s/d Triwulan I 2018 dari segi biaya tetap efisien terlihat dari pencapaian realisasi biaya terhadap rencana.

➤ **Triwulan II tanggal 2 Juli 2018**

1. Membahas tentang hasil kinerja Triwulan II
2. Perkembangan asset meningkat karena dipengaruhi oleh :
  - Dana pihak ketiga yang meningkat 41% dari posisi Triwulan II di tahun 2017
  - Kredit meningkat 18% dibanding posisi Triwulan II tahun 2017, meskipun belum mencapai rencana kredit Triwulan II tahun 2018.

3. Perkembangan kredit untuk usaha sector ekonomi produktif meliputi kredit musiman, perdagangan dan industry, jasa mengalami penurunan dan masih dibawah target karena secara makro dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional yang masih mengalami pelambatan serta pesaing pasar kredit yaitu bank umum.
4. Perkembangan kolektibilitas termasuk tingkat NPL menunjukkan :
  - Kredit kolektibilitas meningkat 12% dibanding posisi Triwulan II tahun 2017, sementara kredit non lancar menurun 1% dibanding posisi Triwulan II tahun 2017.
  - Dari perkembangan kolektibilitas tersebut berpengaruh pada angka kredit NPL untuk Triwulan II tahun 2018 sebesar 3,18% lebih rendah dibanding NPL kredit Triwulan yang sama di tahun 2017 yang masih mencapai 3,59%
5. Perkembangan dana pihak ketiga khususnya tabungan meningkat 17,03% dibanding realisasi tabungan pada Triwulan yang sama di tahun 2017 dan tercapai 97,94% dari rencana Triwulan II tahun 2018, karena masih banyak sekolah - sekolah yang telah bekerja sama dengan Bank masih tertunda dalam dalam penyetoran dana ke bank berkaitan dengan rencana penerimaan siswa baru yang jatuh pada semester kedua di tahun 2018.
6. Dalam penyaluran kredit masih diperlukan sumber dana dari pihak ketiga dari bank lain yaitu dari CIMB Niaga dan LPDB, hal ini menunjukkan perkembangan sebagai berikut :
  - Saldo pinjaman bank masih naik 101% dari rencana s/d Triwulan II tahun 2018
  - Triwulan II tahun 2018 proporsi saldo dana pinjaman diterima dari pihak bank umum dan lembaga keuangan non bank mencapai 22% dari nilai out standing kredit bank, sementara s/d Triwulan II tahun 2017 proporsi saldo dana pinjaman diterima dari bank umum dan lembaga keuangan non bank masih mencapai 27% dari nilai out standing kredit bank, sehingga menunjukkan perkembangan porsi pinjaman bank umum menurun.
  - Proporsi dana pihak ketiga pada Triwulan II tahun 2018 mencapai 74% dari nilai out standing, sedangkan pada Triwulan II tahun 2017 mencapai 69% dari nilai out standing, sehingga menunjukkan perkembangan porsi dana pihak ketiga dari masyarakat meningkat.

Dalam hal ini bank berkomitmen untuk berupaya mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman dari Bank Umum. Tetapi disisi lain peranan dana masyarakat dalam penyaluran kredit perlu terus ditingkatkan, sehingga perlu menjadi perhatian khusus bagi Direksi.

Simpanan dana dari masyarakat dari segi beban biaya bunga lebih murah dibanding dana dari pinjaman Bank Umum.

7. Perkembangan pendapatan bank meningkat 5% dibanding posisi Triwulan II tahun 2017 dan mencapai 92% dari rencana pendapatan Triwulan II dalam rencana tahun 2018. Sedangkan biaya meningkat 4% dibanding posisi Triwulan II tahun 2017 dan mencapai 89% dari rencana biaya bank Triwulan II dalam rencana tahun 2018. Perolehan laba meningkat 6% dibanding posisi Triwulan II tahun 2017 dan mencapai 108% dari rencana laba s/d Triwulan II dalam rencana tahun 2018.

➤ **Triwulan III tanggal 13 September 2018**

1. Membahas evaluasi kinerja Triwulan III tahun 2018
2. Kebijakan dan langkah Direksi dalam mengelola bank berjalan wajar dan lancar.
3. Asset bank sebesar Rp. 309.602.426.616,- meningkat 15% dibanding posisi Agustus 2017 dan mencapai 101% dari rencana tahun 2018, dikarenakan adanya peningkatan perkembangan di dana pihak ketiga yaitu tabungan dan deposito.
4. Perkembangan kredit belum mencapai target karena dipengaruhi oleh ketatnya persaingan pasar baik dengan Bank Umum maupun BPR terutama pada penyaluran kredit KUR oleh Bank Umum dimana suku bunga yang diberikan relative rendah.
5. Perkembangan kolektibilitas dan NPL
  - Kredit kolektibilitas lancar menurun 0,17% dibanding posisi kredit s/d Agustus 2017 dan baru mencapai 95% dari rencana s/d Agustus dalam RBB tahun 2018.
  - Prosentase peningkatan kredit 13% diatas prosentase peningkatan NPL yang mencapai 6% sehingga prosentase NPL s/d Agustus 2018 sebesar 3,09%, lebih rendah atau menurun dibanding NPL s/d Agustus 2017 yang masih mencapai 3,28%
6. Realisasi (sebelum pajak) mencapai Rp. 5.652.394.996,- meningkat 1% dibanding laba s/d Agustus 2017 dan baru mencapai 93% dari target laba s/d Agustus sebesar Rp. 6.100.901.788,- dalam rencana tahun 2018
7. Modal disetor s/d Agustus 2018 dari penyertaan modal daerah telah mencapai Rp. 25.000.000.000,-
8. Likuiditas bank diukur menurut :
  - Cash ratio tercatat sebesar 16,64%, perbandingan dari alat likuid sebesar Rp. 34.272.525.051 dengan hutang lancar sebesar Rp. 205.873.192.149,- masih dalam tingkat sehat.



- Rasio LDR sebesar 86,84% merupakan perbandingan out standing credit sebesar Rp. 263.686.964.567,- dengan dana dan modal sebesar Rp. 303.612.739.632,- masih dalam tingkat sehat.
9. Dari perkembangan kredit yang belum tercapai dari target rencana, maka Direksi akan melakukan berbagai upaya agar pada akhir tahun 2018 target kredit dapat dicapai bahkan terlampaui.
10. Kesimpulan :
- Dengan telah beroperasionalnya 12 Kantor Kas Pelayanan Bank di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Pati maka agar diupayakan untuk memperluas jaringan pemasaran serta pelayanan bank di desa – desa yang semakin dekat dan terjangkau dengan adanya Kantor Kas Pelayanan.
  - Direksi agar mengintensifkan upaya promosi dan pendekatan melalui peran Kantor Kas Pelayanan agar semakin banyak terjalin kerjasama dalam bentuk kerjasama antara bank dengan desa – desa dalam hal penyaluran kredit penghasilan perangkat desa.
  - Bank agar meningkatkan anggaran dan frekwensi kegiatan program literasi keuangan yang difokuskan dalam kegiatan sosialisasi sekaligus promosi dengan pengenalan produk tabungan, deposito dan kredit perbankan dengan sasaran kepada kelompok usaha, industry rumahan, UMKM dan usaha sector informal di pedesaan.

➤ **Triwulan IV tanggal 31 Desember 2018**

1. Membahas tentang hasil kinerja Triwulan IV (semester II) tahun 2018
2. Secara umum kebijakan dan langkah strategis Direksi PD. BPR Bank Daerah Pati dalam mengelola bank dapat berjalan wajar yang sesuai norma peraturan perbankan sehingga operasional bank terkendali dan mengalami pertumbuhan.
3. Perkembangan kinerja keuangan s/d Desember 2018 :
  - Aset meningkat 11% dibanding posisi asset Desember 2017 dan baru mencapai 97% dari target asset dalam RBB tahun 2018.
4. Masih lambannya perkembangan kredit yang belum mencapai target rencana karena dipengaruhi ketatnya persaingan pasar, baik dengan bank umum maupun antar BPR. Untuk tetap eksis dan bertahan pada ketatnya persaingan, bank menempuh kebijakan dengan penurunan tingkat suku bunga kredit yang nanti akan berdampak pada pendapatan operasional bank.
5. Perkembangan kolektibilitas kredit dan NPL menunjukkan :
  - Kredit lancar baru mencapai 97% s/d Desember 2018 dari rencana s/d Desember 2018, meningkat 15% dibanding posisi kredit s/d Desember 2017. Sementara NPL telah mencapai 108%

- dari rencana NPL s/d Desember 2018 meningkat 16% dibanding posisi NPL s/d Desember 2017.
- Peningkatan kredit mencapai 15% masih dibawah prosentase NPL yang mencapai 16% sehingga prosentase NPL s/d Desember 2018 sebesar 2,79% lebih tinggi dibanding prosentase NPL s/d Desember 2017 yang masih mencapai 2,77%.
6. Realisasi laba (sebelum pajak) mencapai Rp. 9.737.636.013,- meningkat 0,26% dibanding laba s/d Desember 2017 dan mencapai 92% dari rencana laba s/d Desember 2018. Hal ini disebabkan belum tercapainya target kredit dan adanya kebijakan penurunan suku bunga kredit.
  7. Modal dasar yang ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,- sementara modal yang disetor yang berasal dari penyertaan modal daerah telah mencapai Rp. 25.000.000.000,-
  8. Sampai dengan Desember 2018 perkembangan kredit masih belum tercapai sesuai dengan rencana tahun 2018.
  9. Dari perkembangan kinerja tersebut maka Dewan Pengawas merekomendasikan kepada Direksi untuk hal - hal sebagai berikut :
    - Dengan telah beroperasionalnya 12 Kantor Pelayanan Kas di wilayah Kecamatan Kabupaten Pati diharapkan bisa memperkuat dan memperluas jaringan pemasaran kredit di masing - masing Kantor Kas Pelayanan dan sekitarnya.
    - Direksi agar mengintensifkan upaya promosi dan pendekatan melalui peran Kantor Kas Pelayanan di wilayah kecamatan Kabupaten Pati terutama di desa - desa untuk penyaluran kredit bagi perangkat desa.
    - Bank agar meningkatkan anggaran dan frekwensi kegiatan program literasi keuangan yang difokuskan dalam kegiatan sosialisasi sekaligus promosi pengenalan produk tabungan, deposito dan kredit
    - Bank perlu memodifikasi sebagian mobil operasionalnya sebagai sarana promosi yang menampilkan profil serta produk pelayanan bank agar semakin dikenal oleh masyarakat.

#### **b. DIREKSI**

Direksi merupakan bagian dari Organ Utama GCG yang bertanggung jawab atas jalannya pengelolaan perusahaan, bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan Bank dalam perkara di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi PD. BPR Bank Daerah Pati bertugas sesuai masing masing bidang kerja, demi mencapai efektifitas pengelolaan dan pencapaian hasil yang maksimal. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direksi PD. BPR Bank Daerah Pati senantiasa menjunjung tinggi sikap profesional, obyektif,

berpikiran strategis dan mengedepankan kepentingan Bank, untuk meningkatkan nilai tambah bagi Pemangku Kepentingan dan memastikan keberlanjutan usaha Bank.

Pedoman kerja Direksi dalam menjalankan peran dan fungsi pengelolaan Bank serta mengelola hubungan dengan Dewan Pengawas, disusun berdasarkan ketentuan anggaran dasar, ketentuan perundang - undangan dan prinsip - prinsip GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran.

Susunan Direksi PD. BPR Bank Daerah Pati per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Direktur Utama : Arif Budiarto, S.E., M.M.  
Direktur Kepatuhan : Sudono, S.E., M.M.  
Direktur Pemasaran : Sri Hartiwin, S.E., M.M.

Seluruh anggota Direksi PD. BPR Bank Daerah Pati telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan serta seluruhnya berdomisili di Indonesia. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham atau hubungan dengan PD. BPR Bank Daerah Pati, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Komposisi anggota Direksi PD. BPR Bank Daerah Pati telah mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, gender, maupun keahlian.

Masing - masing anggota Direksi memiliki kompetensi tinggi yang mendukung peningkatan kinerja perusahaan. Selain itu, seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain, perusahaan, dan/atau lembaga lain sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Selama menjalankan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

#### **Tugas dan Tanggung jawab Direksi**

Secara umum, Direksi bertanggung jawab dalam mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi tersebut antara lain :

- a) Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya.

- b) Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi audit internal dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit internal sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Pengawas.
- c) Melaksanakan prinsip – prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank dan untuk itu Direksi wajib membentuk :
  - Satuan Kerja Audit Internal.
  - Satuan Kerja Manajemen Risiko
  - Satuan Kerja Kepatuhan.
- d) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- e) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, Direksi wajib melaksanakannya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Bank, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2018 PD. BPR Bank Daerah Pati telah mempunyai Pejabat Eksekutif yang menjalankan Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT.

## **Agenda Rapat Direksi dan Dewan Pengawas Tahun 2018**

### **➤ Triwulan I tanggal 2 Pebruari 2018**

1. Membahas kinerja dan hasil semester II (per Desember 2017)
  - Aset rencana per 31/12/2017 sebesar Rp. 272.999.999.999,- tercapai sebesar Rp. 283.653.543.376 atau 103,9%
  - Rencana kredit per 31/12/2017 sebesar Rp. 240.999.999,- tercapai sebesar Rp. 242.066.801.362,69 atau 100,44%
  - Dana pihak ketiga :
    - Tabungan tercapai sebesar Rp. 95.467.488.599,30 sekitar 108,36% dari rencana sebesar Rp. 88.099.999.999,-
    - Deposito tercapai sebesar Rp. 85.850.500.000,- atau 111,20% dari rencana sebesar Rp. 81.099.999.000,-
  - Rencana pendapatan per 31/12/2017 sebesar Rp. 41.994.999.999,- tercapai sebesar Rp. 41.367.091.980 atau 98,8%
  - Biaya rencana per 31/12/2017 sebesar Rp. 31.154.900.900,- tercapai sebesar Rp. 30.982.262.571 atau 99,44%
  - Laba sebelum pajak rencana per 31/12/2017 sebesar Rp. 9.708.999.999,-tercapai sebesar Rp. 9.712.271.179,- atau 100,03%

- Laba bersih rencana per 31/12/2017 sebesar Rp. 7.172.999.999,- tercapai sebesar Rp. 7.194.786.423,- atau 100,93%
  - NPL per 31/12/2017 sebesar 2,77%
2. Membahas operasional bulan Januari 2018
- Aset rencana 31/1/18 sebesar Rp. 280.223.999.999,- tercapai sebesar Rp. 284.959.468.211,60
  - Kredit tercapai sebesar Rp. 245.179.078.693,,69 dari rencana di bulan Januari 2018 sebesar Rp. 245.177.508.999,-
  - Dana pihak ketiga
    - Tabungan tercapai sebesar Rp. 95.342.671 dari rencana sebesar Rp. 90.567.544.999,-
    - Deposito tercapai sebesar Rp. 88.005.600.000,- dari rencana sebesar Rp. 85.512.500.000,-
  - Pendapatan operasional di rencana bulan Januari 2018 sebesar Rp. 3.630.357.946 tercapai sebesar Rp. 3.628.887.515,-
  - Biaya operasional di rencana bulan Januari 2018 sebesar Rp. 3.047.489.369,- tercapai sebesar Rp 2.788.454.235,-
  - Laba sebelum pajak di rencana bulan Januari 2018 sebesar Rp. 519.453.410,- tercapai sebesar Rp. 830.568.569,-
  - Laba bersih di rencana bulan Januari 2018 Rp. 286.770.110,- tercapai sebesar Rp. 636.727.110,-
3. Dalam rapat juga membahas beberapa hal antara lain :
- Pengajuan pemindahan tempat Kantor Kas Juwana yang lama ke Kantor Kas yang baru sudah disetujui oleh OJK dengan Surat Nomor : S-79/KR.0313/2018 tanggal 29 Januari 2018 dan sepakat untuk segera dipindah pada tanggal 3 - 4 Pebruari 2018, sehingga Senin, 5 Pebruari 2018 sudah bisa beroperasi di kantor baru.
  - Pembelian tanah dan bangunan di Jalan Supriyado untuk parkir karyawan dan parkir kendaraan kantor serta untuk gedung arsip sudah diproses dan diputuskan untuk dibeli dengan harga Rp. 4.400.000.000,- ( Empat milyar empat ratus juta rupiah ) dimana pajak akan ditanggung masing - masing pihak.
  - PD. BPR Bank Daerah Pati suddah mengajukan Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan yaitu Sudono, SE.,MM. dan telah melalui Fit & Prpopor Test dari OJK dan dinyatakan lulus untuk Direksi Yang Membawahi Kepatuhan.
  - Rencana perubahan Kantor Kas Juwana menjadi Kantor Cabang.

➤ **Triwulan II tanggal 6 April 2018**

1. Membahas tentang rencana perubahan/revisi RKAP tahun 2018, rencana pengembangan Struktur Organisasi PD. BPR Bank Daerah Pati dan perkembangan kredit sampai dengan Triwulan I (Maret 2018).

2. Direksi bersepakat akan mengembangkan struktur organisasi bank mengingat kebutuhan kinerja perusahaan yang makin bertambah besar. Perubahan struktur organisasi juga diperlukan karena untuk mengakomodasikan jenjang karier jabatan eksekutif bank.
3. Direksi akan melakukan revisi RKAP tahun 2018 sehubungan adanya rencana pengembangan struktur organisasi dimana dalam revisi ini akan diadakan perubahan tertentu pada target - target yang akan dicapai pada tahun 2018
4. Menekan angka NPL kredit dan meningkatkan efektivitas penanganan kredit dengan memprioritaskan 5 (lima) nasabah kredit yang masuk dalam kolektibilitas kurang lancar yang berpotensi macet.
5. Meningkatkan penghimpunan dana masyarakat dengan melanjutkan produk tabungan arisan yang telah jatuh tempo untuk bisa dibuka lagi dengan periode yang baru.
6. Memegang prinsip transparansi pada proses rekrutmen pegawai untuk mengisi kekosongan karena rencana pengembangan struktur organisasi sesuai dengan komitmen yang ada dalam pelaksanaan tata kelola bank.
7. Terkait dengan Surat OJK Nomor : S-66/KR.03112/2018 tanggal 3 April 2018 tentang pelaksanaan RKAT semester 2 tahun 2017 yang ditujukan kepada Dewan Pengawas, masih perbedaan data - data angka dari OJK yang tidak sesuai dengan data di Bank sehingga perlu diklarifikasi ke OJK.
8. Dari hasil pembahasan tersebut diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
  - Akan segera dibuat surat Dewan Pengawas untuk menanggapi surat OJK tentang perbedaan data angka dari OJK dengan data angka di bank.
  - Direksi perlu segera mempersiapkan secara matang dan menyusun kajian terkait rencana perubahan/pengembangan struktur organisasi bank.

➤ **Triwulan III**

**a. Tanggal 3 Agustus 2018**

1. Membahas kinerja dan hasil bulan pertama Triwulan III tahun 2018
  - Aset tercapai 100,34% dengan rincian untuk rencana tahun 2018 sebesar Rp. 303.883.999.999,- tercapai sebesar Rp. 304.930.341.105,-
  - Kredit di rencana tahun 2018 sebesar Rp. 270.229.999.999,- realisasinya sebesar Rp. 254.816.806.241,- jadi hanya tercapai sebesar 94,30%

- Dana pihak ketiga di rencana per 31 Juli 2018 sebesar Rp. 196.529.568.999,- tercapai sebesar Rp. 199.410.327.089,- atau sekitar 101,47%
  - Laba sebelum pajak di rencana per 31 Juli 2018 sebesar Rp. 5.121.338.229,- tercapai sebesar Rp. 4.932.018.629,- atau hanya sekitar 96,30%
  - Laba bersih di rencana per 31 Juli 2018 sebesar Rp. 3.449.255.159,- dan tercapai sebesar Rp. 3.809.484.071,- atau sekitar 109,07%
2. Membahas tentang pelantikan Direktur baru yaitu Direktur Pemasaran
    - Rencana pelantikan Direksi baru yaitu Sdr. Sri Hartiwin, S.E.,M.M. sebagai Direktur Pemasaran pada tanggal 14 Agustus 2018 bertempat di kantor pusat PD. BPR Bank Daerah Pati. Pengangkatan dan pelantikan Direktur Pemasaran dilaksanakan setelah ada persetujuan dari pihak OJK yang menyatakan lulus fit and proper test kepatutan Direksi.
  3. Membahas tentang Penarikan Undian Tabungan Berlian periode XIII
    - Penarikan undian akan dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2018 di Kecamatan Gembong, tepatnya di lapangan Desa Gembong. Selain penarikan undian tabungan juga akan diserahkan beasiswa kepada sejumlah siswa yang berprestasi dan kurang mampu di tingkat SMP dan SMA atau sederajat.
  4. Membahas tentang pembukaan Kantor Kas Gunungwungkal dan Kantor Kas Sukolilo
    - Setelah permohonan ijin pembukaan Kantor Kas Gunungwungkal disetujui oleh OJK, maka operasional kantor kas Gunungwungkal direncanakan pada tanggal 27 Agustus 2018.
    - Pada semester dua direncanakan akan membuka lagi Kantor Kas di Sukolilo sambil menunggu persetujuan ijin dari OJK.

**b. Triwulan III tanggal 19 September 2018**

1. Kredit masih belum bisa mencapai target, diupayakan untuk penurunan tingkat suku bunga kredit dan pembebasan biaya administrasi.
2. Dana pihak ketiga sudah tercapai melebihi target rencana di bulan September 2018.
3. Pembukaan Kantor Kas baru yaitu Kantor Kas Pelayanan Sukolilo.

4. Rencana tahun 2019 diupayakan untuk pembuatan EDP tentang pembayaran non tunai (financial fintek), bagian IT akan dijadikan 1 (satu) tim sub sendiri yang setara dengan Kepala Kas.
5. Diharapkan bahwa setiap kantor kas bisa lebih mendekati kepada Camat sebagai coordinator wilayah di masing – masing kecamatan Kas serta mempromosikan produk – produk dari PD. BPR Bank Daerah Pati.
6. Rencana tahun 2019 ada pengadaan mobil inventaris yang ada tulisan dan logo sebagai salah satu sarana promosi agar PD. BPR Bank Daerah Pati bisa lebih dikenal oleh masyarakat.
7. Agenda rapat Direksi dan Dewan Pengawas dijadwalkan kembali pada bukan Oktober 2018 dengan materi pembahasan persiapan pembuatan RBB 2019.

**c. Triwulan IV**

1. Membahas tentang kinerja sampai dengan menjelang akhir bulan per tanggal 27 Desember 2018
2. Kredit terealisasi sebesar Rp. 282.342.605.928,- dari rencana Rp. 290.549.999.999,- atau sebesar 97,18 %
3. Dana pihak ketiga per 27 Desember 2018 untuk tabungan tercapai sebesar Rp. 107.308.058.504,- atau sebesar 101,24% dari rencana anggaran sebesar Rp. 105.997.999.999,- sedangkan deposito tercapai Rp. 106.600.739.000,- atau sebesar 103,15 % dari rencana anggaran sebesar Rp. 103.345.000.000,-
4. Pendapatan sampai dengan menjelang akhir bulan masih diupayakan untuk bisa tercapai baik untuk laba kotor maupun laba bersih minimal bisa melebihi laba tahun 2017.
5. Sampai dengan akhir tahun 2018 PD. BPR Bank Daerah Pati telah mempunyai 12 Kantor Kas. Direncanakan pada tahun 2019 akan membuka Kantor Kas baru dan Kantor Cabang yang sudah dalam proses pengajuan ijin ke OJK.
6. Tahun 2019 direncanakan juga ada penambahan karyawan melalui rekrutmen yang akan dilakukan dengan beberapa tahap dan juga bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu dari Unisbank Semarang.
7. Karena kebutuhan dana sudah tercukupi dari penggalan dana masyarakat yang berupa tabungan dan deposito, maka PD. BPR Bank Daerah Pati tidak melakukan kerjasama dengan bank umum untuk pengambilan lingkade program.



### III. FUNGSI AUDIT INTERN

Fungsi Audit Internal di PD. BPR Bank Daerah Pati dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai unit yang dibentuk untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional PD. BPR Bank Daerah Pati melalui kegiatan audit dan konsultasi yang independen dan objektif.

Dalam melaksanakan fungsinya, SKAI melakukan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, tata kelola, serta memberikan konsultasi bagi pihak intern PD. BPR Bank Daerah Pati yang membutuhkan. SKAI telah bertindak independen terhadap unit kerja operasional dan Kepala SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Pengawas. Pertemuan SKAI dengan Direktur Utama, Dewan Pengawas dapat dilakukan sewaktu-waktu diperlukan, di luar pertemuan yang dilakukan secara berkala. Dalam pelaksanaan audit, SKAI senantiasa berpedoman pada Manual Kerja dan Piagam Audit Internal sebagaimana yang telah ditetapkan dan telah disusun berdasarkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank dari Bank Indonesia dan ketentuan lain yang berlaku. Secara umum tugas pokok SKAI, antara lain sebagai berikut :

- Menyusun dan melaksanakan rencana audit tahunan berbasis risiko dan melaporkan realisasinya.
- Menguji dan mengevaluasi proses manajemen risiko, pengendalian internal dan proses tata kelola untuk menilai kecukupan dan efektivitasnya.
- Melaksanakan pengkajian kualitas kredit.
- Memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi objektif tentang kegiatan yang diperiksa.
- Melaksanakan investigasi/pemeriksaan khusus berdasarkan permintaan Direktur Utama atau Dewan Pengawas ke unit kerja atau kalau ada indikasi tertentu.
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut yang telah dilakukan audit atas rekomendasi hasil audit.

Efektivitas pelaksanaan fungsi Audit Internal dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dikaji ulang oleh pihak eksternal yang independen sekurang - kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

### IV. FUNGSI AUDIT EKSTERN

#### a) AUDIT OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

PD. BPR Bank Daerah Pati Jalan Supriyadi No. 71 Pati No. Telp. 0295 381208 pada tahun 2018 telah di periksa oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan Instruksi Pemeriksaan Umum Nomer : SR - 217/KR.0311/2018 tanggal 3 Oktober 2018, waktu pemeriksaan mulai tanggal 8 Oktober 2018 yang berakhir pada tanggal 12 Oktober 2018 posisi 31 Agustus 2018.

Dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Umum Nomor : SR-217/KR.0311/2018 per 3 Oktober 2018 dan telah di tanggapi oleh PD. BPR Bank Daerah Pati dengan beberapa tahap yaitu Nomor : 601879001/69/X.18 tanggal 16 Oktober 2018, Nomor : 601879001/95/X.18 tanggal 26 Oktober 2018, Nomor : 601879001/54/XI.18 tanggal 21 November 2018, Nomor : 601879001/76/XI.18 tanggal 28 November 2018 tentang Tindak Lanjut Komitmen Hasil Pemeriksaan OJK.

b) Audit Akuntan Publik.

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan akan kami lakukan proses sebagai berikut :

1. Penunjuk surat dari PD. BPR Bank Daerah Pati kepada Kantor Akuntan Publik " KAP HELIANTONO & rekan " Kantor Cabang Semarang alamat Jl. Tegalsari Barat V No. 24 Semarang, Nomor : 877/4/XI.18, tanggal 2 November 2018 tentang permohonan proposal Penawaran Jasa Audit.
2. Ditanggapi oleh Kantor Akuntan Publik dengan Surat Nomer : 295/KAP.HNR/SK/U/XI/2018 tanggal 3 November 2018 Perihal Penawaran Proposal Audit Umum atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2018.
3. Surat ke Bupati Pati Nomor 045.02/83/XI.18 per 30 November 2018 perihal Permohonan Persetujuan Pemakaian Akuntan Publik.
4. RUPS dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2018 membahas tentang penunjukan KAP Audit tahun buku 2018 dan akan segera di mintakan persetujuan ke Bupati.
5. Surat Bupati Pati Nomor : 539.4/5038, tanggal 10 Desember 2018 tentang Persetujuan Penunjukan KAP Audit tahun Buku 2018 oleh Kantor Akuntan Publik " KAP HELIANTONO & Rekan " Kantor Cabang Semarang alamat Jl. Tegalsari Barat V No. 24 Semarang
6. Surat Nomor : 877/27/XII.18, tanggal 11 Desember 2018 PD. BPR Pati menunjuk Kantor Akuntan Publik " KAP HELIANTONO & Rekan " Kantor Cabang Semarang alamat Jl. Tegalsari Barat V No. 24 Semarang yang telah di setujui oleh Bupati untuk melakukan Audit tahun buku 2018.
7. Pada hari selasa tanggal 17 Desember 2018 dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 731 - 08/KAP-EL/12/18 tentang Penugasan Audit Laporan Keuangan PD. BPR Bank daerah Pati tahun buku 2018, antara Arif Budiarto, SE.,MM. selaku Direktur Utama dengan Drs. SUGANDHI, CA.CPA selaku Pimpinan Cabang /Partner Kantor Akuntan Publik "KAP HELIANTONO" Kantor Cabang Semarang, alamat Jl. Tegalsari Barat V No. 24 Semarang.

8. Surat Kepada Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 601879001/37/XII.18 tanggal 18 Desember 2018 perihal Laporan Penunjukan AP dan/atau KAP dalam rangka Audit atas informasi Keuangan Historis Tahun Buku 2018.

**v. PENJELASAN TENTANG MANAJEMEN RISIKO**

Prinsip - prinsip Manajemen Risiko termasuk jenis Risiko yang harus diterapkan oleh BPR disesuaikan dengan karakteristik kegiatan usaha BPR dan diselaraskan dengan ketentuan mengenai penerapan Manajemen Risiko pada bank umum dan perbankan syariah.

Manajemen Risiko pada dasarnya merupakan standar perbankan untuk dapat beroperasi secara berhati - hati dalam ruang lingkup perkembangan kegiatan usaha dan operasional perbankan yang sangat pesat dewasa ini.

Mempertimbangkan masih terdapatnya kesenjangan pada industri BPR, penerapan Manajemen Risiko dibedakan sesuai dengan kegiatan usaha, produk, dan layanan serta kemampuan BPR dalam hal keuangan, infrastruktur pendukung maupun sumber daya manusia. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan ketentuan ini sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh BPR dalam menerapkan Manajemen Risiko.

Dengan ketentuan ini, BPR diharapkan mampu melaksanakan seluruh aktivitas secara terintegrasi dalam suatu pengelolaan Risiko yang akurat dan komprehensif. BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dan kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) wajib menerapkan Manajemen Risiko paling sedikit 4 (empat) risiko yaitu :

**a. Risiko Kredit**

Yang dimaksud dengan Risiko kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BPR. Dalam memberikan kredit kepada debitur, Perusahaan Daerah Bank Pekreditan Rakyat Bank Daerah Pati selalu melakukan analisis permohonan kredit, peninjauan agunan, dan pengikatan agunan kredit serta melaporkan perkembangan kegiatan usaha debitur termasuk kondisi kreditnya, sehingga dapat dijadikan acuan dalam memantau dan menekan meningkatnya kredit non lancar. Setiap pemberian kredit kepada debitur selalu dibuatkan perjanjian kredit yang mengatur hak dan kewajiban antara pihak bank sebagai pemberi kredit dan pihak debitur sebagai penerima kredit.

**b. Risiko Operasional**

Yang dimaksud dengan Risiko operasional adalah Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya masalah ekstern yang mempengaruhi operasional BPR.

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati sudah memiliki pedoman tertulis tentang PPAP yang dijadikan acuan dalam melaksanakan kewajiban penyediaan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat memiliki Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan operasional sehari - hari.

c. Risiko Kepatuhan

Yang dimaksud dengan Risiko kepatuhan adalah Risiko akibat BPR tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang - undangan dan ketentuan lain termasuk Risiko akibat kelemahan aspek hukum. Kelemahan aspek hukum antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang - undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati dalam menjalankan usahanya selalu berpedoman pada aturan yang berlaku baik dari OJK maupun dari perundang - undangan yang berlaku.

d. Risiko Likuiditas

Yang dimaksud dengan Risiko likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan BPR untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan/atau kondisi keuangan BPR. Untuk menjaga likuiditas, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati mempunyai catatan posisi likuiditas untuk memantau kewajiban - kewajiban perusahaan yang akan jatuh tempo, selalu dipantau dan dianalisa setiap harinya.

Berdasarkan Surat dari OJK Nomor : S-32/KR.0313/2018 tanggal 16 Januari 2018 perihal Pengangkatan Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko, maka per Januari 2018 Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko pada PD. BPR Bank Daerah Pati sudah bisa melaksanakan tugasnya sebagai tindak lanjut dari surat OJK tersebut.

**VI. PENGAWASAN AKTIF DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI**

Dewan Pengawas dan Direksi PD. BPR Bank Daerah Pati telah memahami risiko - risiko yang dihadapi PD. BPR Bank Daerah Pati dan memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif serta mengembangkan budaya Manajemen Risiko. Dewan Pengawas bertanggung jawab dalam melakukan persetujuan dan peninjauan berkala mengenai

strategi dan kebijakan risiko yang mencakup tingkat toleransi bank terhadap risiko.

Direksi PD. BPR Bank Daerah Pati telah menetapkan struktur organisasi yang mencerminkan secara jelas mengenai batas wewenang, tanggung jawab dan fungsi, serta independensi antar unit bisnis dengan unit kerja manajemen risiko. Selain itu, Direksi juga bertanggung jawab untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan risiko tersebut dengan cara menjabarkan dan mengkomunikasikan kebijakan dan strategi risiko, memantau dan mengendalikan risiko dan mengevaluasi penerapan kebijakan dan strategi dimaksud. Secara berkala, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan evaluasi terhadap akurasi metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko, dan kebijakan prosedur dan limit risiko.

#### **VII. KECUKUPAN, KEBIJAKAN, PROSEDUR DAN PENETAPAN LIMIT**

Penerapan Manajemen Risiko di PD. BPR Bank Daerah Pati telah didukung dengan kerangka yang mencakup kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta limit Risiko yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi, skala, kompleksitas bisnis dan strategi bisnis bank. Bank memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang memenuhi prinsip transparansi, peningkatan kualitas pelayanan nasabah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. PD. BPR Bank Daerah Pati senantiasa melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan manajemen risiko dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi internal dan eksternal

#### **VIII. KECUKUPAN PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN RISIKO SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO**

PD. BPR Bank Daerah Pati sampai saat ini baru akan melakukan proses identifikasi dan pengukuran risiko terhadap setiap kegiatan yang mengandung risiko. Identifikasi risiko yang dilakukan mencakup seluruh aktivitas bisnis Bank dan dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya dengan membentuk Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh OJK dan akan segera melaksanakan tugas - tugasnya.

Dan selanjutnya untuk Pejabat Eksekutif juga akan berfungsi melakukan pemantauan eksposur risiko yang memadai, meliputi adanya fungsi yang independen yang melakukan pemantauan terhadap eksposur risiko, adanya sistem informasi yang disesuaikan dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas kegiatan usaha Bank dan tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan. Dalam pelaksanaannya Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko ke depannya akan membangun proses yang komprehensif

dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko serta menyampaikan laporan atas tingkat risiko.

#### **IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR**

Dalam penyaluran dana khususnya kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana jumlah besar, Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) dan memperhatikan prinsip kehati - hatian. Kebijakan tersebut secara berkala ditinjau ulang untuk dikinikan agar selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar telah memperhatikan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran portofolio penyediaan dana.

Selama tahun 2018 tidak pernah terjadi pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit atas penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada Debitur inti, serta tidak ada konsentrasi kredit kepada Nasabah tertentu.

#### **X. RENCANA STRATEGIS BANK**

Rencana strategis PD. BPR Bank Daerah Pati disusun dengan mempertimbangkan kondisi internal dan perkiraan akan perubahan lingkungan eksternal, yang berpedoman pada prinsip dasar sebagai berikut :

- a. Fokus pada core business yang dimiliki.
- b. Menyesuaikan terhadap perubahan bisnis dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian.
- c. Memberi perhatian dan memperhatikan kepentingan dari para Stakeholders.
- d. Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*)

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Bank, maka Rencana Jangka Panjang disusun dengan beberapa strategi pokok dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pertumbuhan modal secara organik
- 2) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada kegiatan operasional Bank.
- 3) Meningkatkan terus menerus profesionalisme dan produktivitas Sumber Daya Manusia.
- 4) Partisipasi dalam mendukung kegiatan ekonomi sesuai Visi dan Misi Bank.
- 5) Mengembangkan kebutuhan teknologi informasi sesuai dengan perkembangan teknologi perbankan. Bank secara konsisten terus berusaha merealisasikan seluruh rencana jangka panjang (*corporate plan*) dengan menetapkan langkah - langkah yang akan dilakukan setiap tahunnya

dalam Rencana Bisnis Bank (*business plan*) guna mencapai rencana jangka panjang tersebut.

#### **XI. RENCANA JANGKA PENDEK DAN MENENGAH (BUSINESS PLAN)**

Memasuki tahun 2018 PD. BPR Bank Daerah Pati tetap konsisten pada kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan yang mendasarkan pada 4 (empat) perspektif utama yaitu :

- Perspektif Keuangan
  - Meningkatkan nilai perusahaan (*company value*) dengan pencapaian kinerja yang berkelanjutan (*sustainable growth*).
  - Mempertahankan tingkat profitabilitas Bank.
  - Menjaga Kualitas Aktiva Produktif (NPL) yang rendah.
  - Meningkatkan laba perusahaan
- Perspektif Nasabah
  - Meningkatkan penyaluran kredit di sektor Mikro, Kredit Pegawai, Kredit perdagangan, kredit pertanian dan kredit usaha kecil dll.
  - Meningkatkan penghimpunan dana untuk mendukung penyaluran kredit dengan pemeliharaan tingkat likuiditas yang baik dan stabil.
  - Meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah.
- Perspektif Proses Bisnis internal
  - Meningkatkan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)
  - Menyempurnakan kebijakan, sistem dan prosedur sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko serta sekaligus untuk peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas.
- Perspektif Pengembangan
  - Meningkatkan inovasi dan produktivitas karyawan melalui proses pelatihan, pendidikan, workshop, lokakarya dan pola pengembangan SDM lainnya.

#### **XII. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN**

Bank senantiasa menginformasikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada Stakeholders maupun pihak lain yang berkepentingan dengan mempublikasikan laporan keuangan secara triwulan dan tahunan melalui surat kabar. Laporan keuangan dan laporan lainnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bank Indonesia) dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi tersebut dapat diakses melalui website [www.bankdaerahpati.com](http://www.bankdaerahpati.com) oleh masyarakat untuk mengetahui laporan keuangan, produk dan jasa, serta informasi non keuangan lainnya tentang PD. BPR Bank Daerah Pati. Juga telah tersedia brosur – brosur di setiap kantor Bank misalnya tentang informasi produk, Laporan Publikasi dan tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa antara Bank dengan Nasabah.

**XIII. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS LAINNYA DAN / ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK**

Anggota Dewan Pengawas dan Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga baik dengan sesama anggota Dewan Pengawas, Direksi lainnya termasuk Pemegang Saham Pengendali.

**XIV. PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD) DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BANK**

Sepanjang tahun 2018 tidak terdapat penyimpangan (*internal fraud*) yang terjadi di PD. BPR Bank Daerah Pati baik yang immaterial maupun material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

**XV. PERMASALAHAN HUKUM**

Permasalahan hukum yang dihadapi oleh PD. BPR Bank Daerah Pati pada umumnya terkait dengan penyelesaian kredit bermasalah. Tidak terdapat permasalahan hukum pada tahun 2018 yang mempengaruhi jalannya operasional bank.

**XVI. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN**

Sepanjang tahun 2018 tidak terdapat benturan kepentingan oleh Pengurus baik yang tidak maupun yang merugikan/menurunkan keuntungan Bank terkait dengan pengambilan keputusan bisnis.

**XVII. PEMBERIAN DANA UNTUK KEPENTINGAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK**

Sepanjang tahun 2018, PD. BPR Bank Daerah Pati tidak pernah memberikan dana dalam bentuk apapun untuk kepentingan politik. Dan sebagai wujud tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*), PD. BPR Bank Daerah Pati telah memberikan sumbangan sosial untuk warga sekitar, terlibat aktif dalam berbagai aktivitas bakti sosial, bencana alam, olah raga, kesehatan dan kegiatan keagamaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

**XVIII. KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS**

Pengurus bank antara lain Direksi dan Dewan Pengawas memperoleh gaji dan fasilitas sesuai dengan kemampuan perusahaan. Dewan Pengawas menerima honor dari perusahaan yang dibayarkan setiap tanggal 25, THR, gaji ke-13, Jasa Produksi, jasa pengabdian pada akhir masa jabatan. Sedangkan Direksi menerima gaji pokok beserta tunjangan - tunjangan antara



lain tunjangan jabatan, operasional Direktur Utama, sosial anak/istri, beras, subsidi pajak pasal 21, bantuan pendidikan, insentif, gaji ke-13, THR, jasa produksi, mobil dinas, fasilitas telepon, asuransi kesehatan, tunjangan perumahan, uang saku cuti, tambahan penghasilan pencapaian target, asuransi jabatan dan jasa pengabdian pada akhir masa jabatan.

#### **XIX. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH**

- a. Rasio Gaji Pegawai
  - Terendah : Rp. 2.785.450,-
  - Tertinggi : Rp. 10.788.660,-
  - Rasio Gaji : 26,6 %
- b. Rasio Gaji Direksi
  - Terendah : Rp. 24.905.000,-
  - Tertinggi : Rp. 40.500.000,-
  - Rasio Gaji : 61,5 %
- c. Rasio Gaji Dewan Pengawas
  - Terendah : Rp. 12.705.882,-
  - Tertinggi : Rp. 15.882.353,-
  - Rasio Gaji : 79,9 %
- d. Rasio Gaji Dewan Pengawas tertinggi dan Direksi tertinggi
  - Dewan Pengawas : Rp. 15.882.353,-
  - Direksi : Rp. 40.500.000,-
  - Rasio Gaji : 39,2 %
- e. Rasio Gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi
  - Pegawai : Rp. 10.788.660,-
  - Direksi : Rp. 40.500.000,-
  - Rasio : 26,6 %

## KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN TATA KELOLA PD. BPR BANK DAERAH PATI

PD. BPR Bank Daerah Pati telah melakukan penilaian sendiri atas penerapan tata kelola yang baik setiap tahun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 6/SE OJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka PD. BPR Bank Daerah Pati pada tahun 2018 merealisasikan pembuatan Laporan untuk periode bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018.

Berdasarkan hasil self assessment atas pelaksanaan GCG selama tahun 2018, menghasilkan peringkat 1 (satu) atau **“Sangat Baik”** yang mencerminkan PD. BPR Bank Daerah Pati telah melakukan penerapan GCG yang secara umum baik dan pemenuhan atas prinsip-prinsip GCG sudah memadai. Adanya kelemahan dalam penerapan prinsip GCG secara umum tidak signifikan mempengaruhi kegiatan operasional PD. BPR Bank Daerah Pati dan dapat diselesaikan dengan baik oleh Manajemen. PD. BPR Bank Daerah Pati terus berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mendukung keberlanjutan usaha PD. BPR Bank Daerah Pati.

Dari self assessment GCG tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan yang diharapkan, telah berjalan efektif, baik dan konsisten. Proses pelaksanaan prinsip GCG ini tercermin dalam risalah rapat yang diselenggarakan oleh masing-masing organ organisasi (*governance structure*), berbagai penyempurnaan kebijakan, sistem dan prosedur serta temuan pemeriksaan dari unit kerja terkait.
2. Temuan pemeriksaan baik dari Intern (SPI & Internal Control) maupun Eksternal (KAP & OJK) lebih bersifat administratif dan tidak terdapat temuan yang dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank. Selain itu, secara berkala Direksi melakukan kajian terhadap Kebijakan dan Prosedur Bank untuk melakukan revisi/penyempurnannya.
3. Kualitas outcome telah sesuai harapan dan merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

Outcome ini mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain yaitu :

- a) Pelaksanaan fungsi kepatuhan telah dilaksanakan dengan baik, laporan-laporan terkait telah disusun dan dilaporkan tepat waktu kepada OJK/Bank Indonesia/instansi lainnya. Bank juga telah menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.